KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01-2895
	Tanggal Pembuatan	27 DES 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	PENGAJUAN SURAT KUASA ADVOKASI KEPERDATAAN HUKUM PERDATA UMUM

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80.PR.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Advokasi di Bidang Keperdataan;

KETERKAITAN

1. SOP Persuratan
2. SOP Pengajuan Jawaban atas Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. SOP Pengajuan Duplik atas Replik Penggugat di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. SOP Penyiapan Daftar Bukti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

PERINGATAN:

Untuk selalu mengikuti peraturan yang berlaku

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keormasan;
2. Memahami syarat dan tata cara menyusun dan menyiapkan daftar bukti dalam kasus perdata pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Memahami akses SABH; dan
4. Menguasai Tupoksi Subdit Badan Hukum.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Komputer dan kelengkapannya;
2. Panggilan sidang (relas);
3. Gugatan, jawaban, dan replik dari penggugat;
4. Peraturan perundang-undangan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dan dicatat dalam dokumentasi advokasi keperdataan

SOP Pengajuan Surat Kuasa Advokasi Keperdataan Hukum Perdata Umum

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan mendisposisikan kepada Kepala Subdit Hukum Perdata Umum	Mulai				1 Disposisi 2 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 3 Surat Gugatan	2 hari	Disposisi Direktur Perdata	
2	Menerima disposisi, mempelajari dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Advokasi Keperdataan					1 Disposisi 2 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 3 Surat Gugatan	2 hari	Disposisi Kasubdit	
3	Menerima disposisi, mempelajari dan menugaskan Pelaksana membuat konsep Surat Kuasa untuk memenuhi panggilan sidang gugatan perkara perdata					1 Disposisi 2 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 3 Surat Gugatan	1 hari	Disposisi Kepala Seksi Advokasi Keperdataan	
4	Menyiapkan konsep surat kuasa dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Advokasi Keperdataan untuk dikoreksi serta mendapat persetujuan			Y		1 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 2 Surat Gugatan 3 Surat Kuasa	1 hari	Konsep Surat Kuasa dan Nota Dinas	
5	Memeriksa dan menyetujui konsep Surat Kuasa, apabila setuju maka diteruskan kepada Kasubdit Hukum Perdata dan apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki		Y		T	1 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 2 Surat Gugatan 3 Nota Dinas 4 Surat Kuasa	1 hari	Konsep Surat Kuasa dan Nota Dinas	
6	Memeriksa dan menyetujui konsep Surat Kuasa, apabila setuju maka diteruskan kepada Kepala Direktur dan apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada Kasi Advokasi keperdataan untuk diperbaiki	Y		T		1 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 2 Surat Gugatan 3 Nota Dinas 4 Surat Kuasa	2 hari	Konsep Surat Kuasa dan Nota Dinas	
7	Memeriksa konsep surat kuasa, menyetujui Surat Kuasa dan menyampaikan ke Direktur Jenderal Administrasi (Dirjen AHU) untuk diproses lebih lanjut, apabila tidak setuju maka akan dikembalikan kepada Kasubdit Hukum Perdata Umum untuk diperbaiki		T			1 Surat Panggilan Sidang (Relaas) 2 Surat Gugatan 3 Nota Dinas 4 Surat Kuasa	2 hari	Surat Kuasa yang telah disetujui	
8	Surat Kuasa didaftarkan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan didokumentasikan				Selesai	Surat kuasa yang telah ditandatangani oleh para kuasa hukum dan sudah bermaterai	1 hari	Surat Kuasa yang telah terdaftar di Pengadilan	Arsip Surat Kuasa didaftar di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara